



**JASAMARGA**  
Indonesia Highway Corp.

Nomor : BF.HM01.5651

10 Oktober 2016

Lampiran : -

Perihal : **Penjelasan PT Jasa Marga (Persero) Tbk ("Perseroan") atas Pemberitaan di Media Massa**

Kepada Yth.

**Direktur Penilaian Perusahaan  
PT Bursa Efek Indonesia**

Indonesia Stock Exchange Building, Tower I  
Jl. Jend Sudirman Kav 52-53  
Jakarta 12190

**u.p. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Group 2**

Merujuk pada surat PT Bursa Efek Indonesia No: S-06219/BEI.PP2/10-2016 tanggal 6 Oktober 2016 perihal Permintaan Penjelasan atas Pemberitaan di Media Massa, bersama ini kami menyampaikan penjelasan atas pemberitaan tersebut, sebagai berikut:

1) Klarifikasi atas kebenaran berita tersebut.

*Saat ini proses Rights Issue PT Jasa Marga (Persero) Tbk. ("Perseroan") masih berjalan sesuai dengan jadwal dan perkiraan harga Rights Issue Perseroan masih dalam proses pengkajian.*

*Hasil Rights Issue tersebut akan digunakan untuk memperbaiki struktur permodalan Perseroan dengan tujuan meningkatkan kapabilitas keuangan Perseroan untuk mendukung pembangunan ruas-ruas jalan tol baru.*

2) Informasi/kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan serta dapat mempengaruhi harga saham perusahaan.

*Aksi korporasi tersebut dapat mempengaruhi nilai ekuitas dan harga saham perseroan.*

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

**Mohammad Sofyan**  
Corporate Secretary

SYE/RTU/any

# JSMR Maksimal Rp5.150, PTPP Rp3.580

JAKARTA — Pemerintah mengpekirakan harga saham pelaksanaan rights issue PT JPP (Persero) Tbk., dalam rentang Rp2.480-Rp3.580 dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk., dalam rentang Rp3.630-Rp5.150 per lembar.

Pelaksanaan itu disandipokan dalam surat Menteri BUMN Rini Soemarno untuk Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bernomor S-388/MBU/06/2016 bertanggal 30 Juni 2016 dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Perekonomian Damin Nasution dan jajaran deputy Kementerian BUMN.

Berdasarkan salinan surat yang diperoleh Bisnis surat itu menyatakan perkiraan harga itu ditetapkan berdasarkan rata-rata harga saham 9 BUMN yang akan melakukan rights issue dalam 30 hari dan 60 hari terakhir serta *Discount to TECP* (theoretical ex-rights price) transaksi sejenis berkisar 2,5%-3%.

Pada saat ini, manajemen Jasa Marga dan PTPP belum mengungkapkan kepada investor melalui keterbukaan informasi dalam laman Bursa Efek Indonesia mengenai perkiraan harga pelaksanaan hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD)

Dua BUMN lain yang akan melakukan rights issue terlebih dulu, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., telah mengumumkan perkiraan harga sebesar Rp1.521-Rp2.505 dan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk., Rp500-Rp565 per lembar.

Pelaksanaan harga yang diumumkan oleh manajemen 2 perusahaan itu tidak jauh berbeda dalam rentang harga yang disampaikan Menteri BUMN dalam suratnya yaitu Rp1.520- Rp5.210 untuk saham Wijaya Karya dan Rp375-Rp565 untuk saham Krakatau Steel.

Kendati demikian, seperti disampaikan oleh manajemen Krakatau Steel dalam pengumumananya, pelaksanaan harga itu merupakan surat Menteri BUMN No.5-580/MBU/10/2016 perihal Penerimaan Kisanan Harga Pelaksanaan (*Exercise Price*) dan Kisanan Jumlah Lembar Saham yang Diterbitkan dan Kisanan Rasio Penambahan Modal Dengan HMETD.

Dikawatirkan mengenai surat itu, Deputy Bidang Strukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN Aloysius Kik Ro mengatakan surat Menteri BUMN akan menjadi acuan umum. "Mungkin depan diumumkan," katanya di Gedung DPR, Rabu (5/7/16).

Sementara itu, Direktur Utama Jasa Marga Desi Aryanui mengatakan harga pelaksanaan untuk saham Jasa Marga sekurang-masih diproses di *underwriter* atau pelaksana penjamin emisi. "Exact angkanya belum keluar," katanya, Rabu (5/7/16).

Direktur Keuangan PTPP Agus Purhimo mengatakan harga pelaksanaan rights issue PTPP masih akan dibalas lagi oleh manajemen perusahaan. "Itu kan dulu ada surat seperti itu, tapi nanti kami mau bahas lagi," katanya, Rabu (5/7/16).

Seperti diketahui, rencana rights issue itu akan dilakukan oleh 4 BUMN setelah mendirikan persetujuan dari Komisi VI, Komisi XI dan Badan Anggaran DPR untuk mendapatkan Persetujuan Modal Negara (PMN) melalui Rps ruliun yang di-anggarkan dalam APBN Perubahan 2016. Berikut mendapatkan PMN itu, cukup BUMN tersebut akan melakukan penambahan modal dengan HMETD atau rights issue dengan target dana sekitar Rp14 triliun. Pelaksanaan aksi korporasi itu akan dilakukan dalam rentang waktu Oktober-November 2016.

Kemarin, Komisi XI memberitalkan persetujuan terhadap rencana aksi korporasi 4 BUMN itu. Halnya semua liaksi di ko-

misi itu menyesuaikan pemberian rencana rights issue, selain Fraksi Partai Gerindra. Tidak seperti tahun lalu, pembalasan PMN untuk BUMN di bawah Kementerian BUMN tidak hanya dilakukan di Komisi VI dan Anggaran, namun juga Komisi XI. Proses persetujuan di Komisi XI dilakukan setelah APBN Perubahan 2016 disetujui.

Ketua Komisi XI Melchias Marcus Mekeeng mengatakan PMN yang dibentuk untuk BUMN adalah yang masyarakat yang ditansukkan ke dalam perusahaan. "Kami berharap proyeknya bisa segera berjalan dan memberikan dividen. Jangan minda PMN terus," katanya.

Sepuluh fraksi menyatakan persetujuan PMN harus sesuai dengan porum takannya. Selain itu, anggota DPR juga menginginkan agar porsi saham negara di BUMN tidak lentihasi ketika melakukan aksi korporasi.

Perwakilan fraksi Gerindra menyatakan pembetulan PMN belum tepat diberitani dengan kondisi APBN pada saat ini.

Dana PMN itu akan digunakan oleh empat BUMN tersebut untuk proyek pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, pembangkit listrik, kawasan industri, pabrik baja dan sebagainya. (Vade Handayani)